

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Aksi budaya dan konsientisasi dalam dunia pendidikan kontemporer saat ini, masih relevan ditelaah dengan menggunakan perspektif Paulo Freire. Terma ini memberikan jawaban bahwa pendidikan dapat berperan melakukan perubahan menuju humanisasi bukan dehumanisasi. Terminologi aksi budaya dan konsientisasi sejajar dengan terminologi lain seperti emansipasi, *civil society*, dan demokrasi yang memiliki basis teori kritis yang melahirkan pendidikan kritis (*critical pedagogy*). Pendidikan kritis memiliki corak mengajarkan penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, penghargaan atas perbedaan dan pembebasan atas dominasi dan ketertindasan.

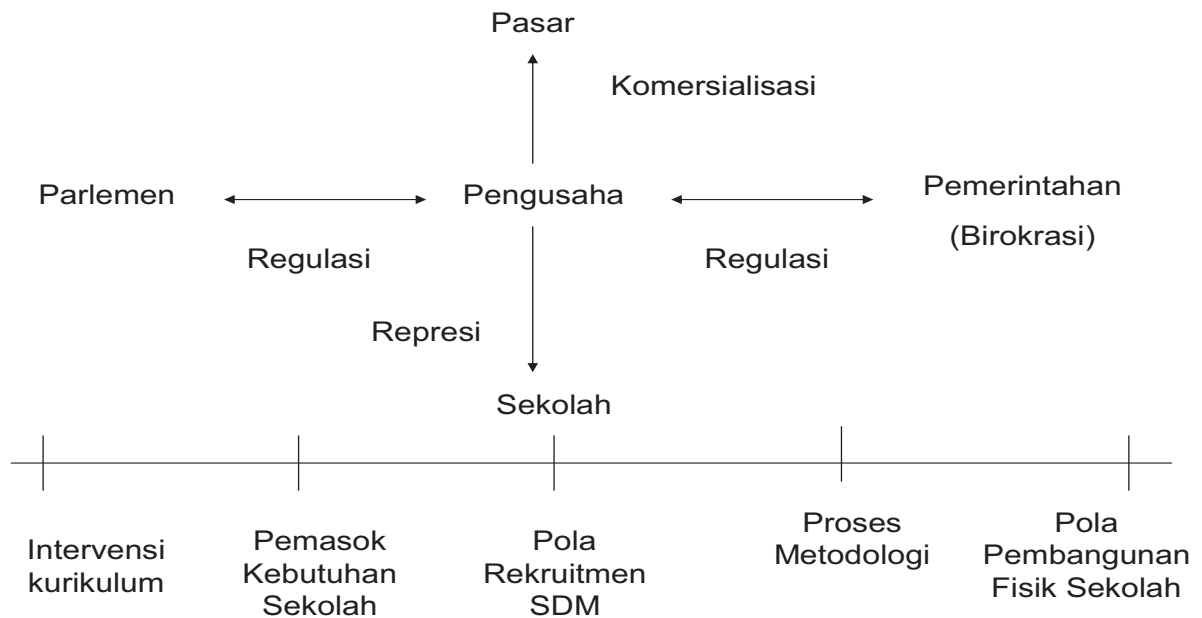
Kemunculannya merupakan reaksi atas kecenderungan ideologi global yang dapat mengancam umat manusia. Eksistensi pendidikan pun tidak bisa mengelak dengan datangnya era ini. Tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi melalui pendidikan mendapat tantangan. Hadirnya era globalisasi menggerakkan sebagian manusia untuk mendapatkan keuntungan melalui pendidikan. Ada upaya untuk mengganti tradisi manusia tentang visi pendidikan sebagai strategi untuk eksistensi manusia yang sudah berjalan berabad-abad, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Sistem dan struktur ekonomi kapitalistik melahirkan komodifikasi yang membuat praktek pendidikan justru melanggengkan kelas sosial dan ketidakadilan sosial.

Meminjam istilah Mansour Fakih, bahwa yang dimaksud dengan komodifikasi adalah proses transformasi yang menjadikan sesuatu menjadi komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan (Fakih, 2001). Berkaitan dengan pendidikan maka yang dimaksud dengan komodifikasi pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Wahono, adalah meletakkan pendidikan untuk mengakumulasi kapital dan mendapatkan keuntungan (Wahono, 2001). Ini artinya bahwa negara telah melepaskan pendidikan pada swasta. Sekolah negeri diberi kesempatan untuk otonom, artinya berswasta, sedang sekolah swasta dibiarkan mencari rekanan kerja kepada perusahaan-perusahaan. Francis Wahono mengemukakan bahwa pendidikan diperlakukan sebagai komoditi terutama sejak ditandatanganinya kesepakatan GATT, di mana dunia secara global telah memihak pada kepentingan pasar. Hal ini dilakukan tidak lain demi membuka peluang bagi Trans National Corporations (TNCs) untuk ekspansi. Paham inilah yang sejak lama berusaha untuk membatasi peran pemerintah dan lebih memberi kesempatan pada perusahaan-perusahaan swasta untuk menjadi aktor dalam bidang ekonomi di bawah situasi persaingan bebas yang diciptakan oleh gagasan pasar bebas. Lebih lanjut dikemukakan oleh Todaro, bahwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, sistem ekonomi lebih merupakan determinan terhadap pendidikan daripada sebaliknya (Todaro, 1995).

Ketika politik ekonomi *laissez-faire* telah merasuk dalam dunia pendidikan, maka berbagai ketimpangan dalam pengembangan sumber daya manusia makin besar. Manusia pada hakikatnya dipandang bersifat rasional. Prinsipnya adalah,

mereka selalu melakukan perhitungan laba rugi dalam perspektif ekonomi. Industrialisasi dan komersialisasi telah mengakibatkan pendidikan di tanah air menjadi amat mahal dan tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat marjinal. Industrialisasi yang memegang teguh prinsip-prinsip rasionalisasi telah melahirkan *disanchantment of the world*. Proses lunturnya daya tarik dunia karena semua yang ada dalam kehidupan bumi dapat dihitung secara rasional. Akibatnya, terjadilah penurunan kualitas kehidupan manusia (dehumanisasi), karena segala hal yang tadinya bersifat subjektif dapat diubah menjadi objektif, kualitatif menjadi kuantitatif.

Berbagai persoalan pendidikan muncul bersamaan ketika regulasi pendidikan diarahkan masuk arus kapitalisme pendidikan sehingga melahirkan penindasan. Regulasi pendidikan memberikan peluang bagi pengusaha melibatkan diri dalam lembaga pendidikan dan menjadi pintu ketika pengusaha menjalin kerjasama dengan para kepala sekolah, pengawas sekolah dan pejabat pendidikan seperti dijelaskan dalam gambar dibawah ini (Prasetyo, 2005).



Sumber: Dikutip dari buku: Orang Miskin Dilarang Sekolah (Prasetyo, 2005)

Gambar 1.1.1. Birokrasi pendidikan yang bercirikan kapitalistik

Gambar 1.1.1 menjelaskan model eksploitasi regulasi di lingkungan pendidikan dasar hingga menengah. Model tersebut bisa berkembang ketika pendidikan bertemu dengan instrumen modal yang memiliki empat wajah ganda. Pertama, adalah organisasi filantropis atau lembaga donor yang saat ini jumlahnya sangat besar. Di bidang pendidikan tinggi keterlibatan mereka adalah melakukan pemformatan kurikulum yang dijalankan lewat lembaga pendidikan tinggi. Kaki tangan untuk melakukan ini biasanya dikerjakan secara mahir oleh sejumlah pusat studi yang bergerak mengikuti isu-isu yang dirancang oleh lembaga donor. Isu yang

biasanya menonjol menyangkut dengan tuntutan kelas menengah seperti liberalisasi, perlindungan hak perempuan, pengelolaan keamanan, transparansi pemerintahan, hak asasi manusia dan resolusi konflik. Dari isu-isu tersebut keluar produk yang beragam dari buku, aktivitas pembelajaran hingga pembentukan sebuah kelompok. Kegunaan isu-isu adalah untuk menggeser wacana konvensional dalam institusi pendidikan dan menggantinya dengan wacana yang sesuai dengan kepentingan dan sistem nilai yang ada dalam lembaga donor.

Jasa utama lembaga donor adalah 'mengarahkan sekaligus mendisiplinkan' sasaran garapan institusi pendidikan. Terlebih jika organ donor menjalin aliansi strategis dengan sejumlah Ornop/LSM yang kini juga mengembangkan 'sistem pendidikan' sendiri. Ada banyak Ornop yang menyelenggarakan pendidikan rakyat dengan bermodalkan uang dari lembaga donor kemudian melakukan model pembelajaran seperti 'buku paket yang disodorkan dan disesuaikan dengan kepentingan lembaga donor'. Meskipun tidak semua institusi bermotif jahat, namun institusi ini tetap mengawal kepentingan sejumlah orang yang menjadi pemegang saham didalamnya. Sisi positif kelompok donor bahwa peran institusi ini belakangan cukup besar dalam menggiring serta mengawal proses perubahan. Aktivitas mereka beragam dari bantuan untuk menumbuhkan lingkungan yang akomodatif pada nilai-nilai demokrasi hingga tampilnya siswa yang terikat pada nilai-nilai itu. Sumbangan uang yang besar dari lembaga donor pada lembaga pendidikan menunjukkan bagaimana tingginya komitmen mereka untuk melakukan pembaharuan pendidikan. Banyak aktivitas yang berdekatan dengan dunia

pendidikan seperti sumbangan bagi penerbitan buku hingga menampilkan guru dengan kategori tertentu.

Kedua, adalah kelompok industriawan yang menjalankan berbagai perusahaan multinasional. Kelompok ini membutuhkan peran lembaga pendidikan tinggi. Beberapa cara yang ditempuh adalah pertama, industriawan menyediakan beasiswa siswa sekolah. Selain bermotif kemanusiaan, tujuan utamanya adalah agar memperoleh 'tenaga' yang pintar sekaligus murah. Kedua, industriawan membuka lowongan tiap tahun yang ditempel di berbagai lembaga pendidikan. Di beberapa perusahaan ada banyak aktivitas yang mengacu pada penetapan kriteria mengenai tenaga kerja seperti yang dibutuhkan dan mandat perguruan tinggi adalah menyediakan manusia-manusia yang sesuai dengan prasyarat itu. Dengan ledakan pengangguran yang tinggi, pembukaan lowongan dengan cara mendatangi langsung lembaga pendidikan, merupakan langkah penghematan sekaligus cara memperoleh tenaga terdidik yang murah. Hal ini lazim dilakukan pada sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi. Pemagangan ini membantu industriawan selain mendapatkan tenaga kerja gratis juga perusahaan bisa berhubungan secara intens dengan dunia pendidikan. Selain itu, dengan pemagangan juga akan mengenalkan siswa pada cara kerja produksi yang berbeda dengan mekanisme yang ada di lingkungan pendidikan. Cara kerja produksi akan melatih siswa untuk berpikir dalam konteks arus produksi dan bagaimana memahami mekanisme hukum pasar.

Ketiga, adalah pasar uang yang selama ini menjadi instrumen finansial. Di lingkungan ini modal melakukan investasi yang cukup besar. Pertama, pasar uang

melakukan penyimpanan dana dan kemudian pengelolaan. Di berbagai perguruan tinggi ada banyak bank didirikan yang dimanfaatkan untuk mengelola semua pembayaran. Di sini bank menjalankan fungsinya yang murni, pinjam-meminjam dan kredit. Arus beroperasinya jasa keuangan ini ikut secara langsung dalam melambungkan ongkos pendidikan karena jasa keuangan selalu mengutip sejumlah pembayaran. Kedua, pasar uang melakukan jasa keuangan yang berdiri di bawah perguruan tinggi dan mencoba menggaet dana dengan mengatasmakan pendidikan. Asuransi pendidikan menjadi populer. Produk jasa keuangan ini dilakukan dengan tujuan agar aktivitas pendidikan yang semula berorientasi pada upaya pencerdasan beralih menjadi komoditas ekonomi. Ketiga, pasar uang membuka sejumlah kelas yang dibiayai dan difasilitasi secara penuh. Terdapat banyak staf di lembaga keuangan yang dipasok sebagai siswa sekaligus menjadi bagian di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan tak jarang para pekerja keuangan kini menjadi pendidik di sejumlah mata pelajaran. Khususnya ilmu ekonomi yang berorientasi pada mekanisme kerja ekonomi dan berkiblat pada sistem pasar. Ilmu ekonomi saat ini berorientasi pada pemupukan ketrampilan dalam mengakumulasi laba dengan modal yang minimal. Konsep pemasaran dan marketing tidak hanya bekerja pada ilmu ekonomi, melainkan menjadi ketrampilan sosial yang harus dipunyai peserta didik. Karenanya pengetahuan ekonomi menjadi ilmu yang wajib ada di semua lembaga pendidikan.

Keempat, wajah instrumen modal yang mengambil peran sebagai kelompok media yang memiliki kegiatan utama dalam penjangkaran opini. Semula media dijadikan hanya sebagai tempat iklan bagi lembaga pendidikan, tapi lama

kelamaan media ikut mengembangkan peran sebagai 'pengarah dan perumus' kebijakan pendidikan. Pendidikan yang berorientasi pasar menjadi cara pandang yang dikokohkan lewat media. Hal ini dapat diketahui dari antusiasnya media pada gagasan liberalisasi pendidikan. Swastanisasi pendidikan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak, karena terbukti kemampuan dan metodenya dalam meningkatkan kualitas. Sensasi dan publisitas yang menjadi andalan media telah membuang isu-isu tentang dunia pendidikan menjadi soal yang 'kerdil'. Tak banyak media yang berusaha menempatkan pendidikan sebagai isu sentral dan utama. Bisa dipahami bahwa media juga bekerja mengikuti alur industri, maka berita pendidikan tidak tergolong berita yang menarik. Media bahkan mengambil fungsi konvensional yakni propaganda lembaga pendidikan yang mahal. Dukungan maupun legitimasi bahwa pendidikan memang perlu mahal membuat media menjadi kekuatan yang mengabsahkan arus besar yang keliru ini.

Demikian juga dengan arah pendidikan akan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi arena pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri sebagaimana 'pesanan sang pemilik modal'. Sinyalemen Darmaningtyas bahwa di Indonesia jumlah siswa dari TK sampai SMTA per tahun rata-rata berjumlah 37 juta adalah pasar besar dan menggiurkan sebagai tempat untuk berbisnis (Darmaningtyas, 1999).

Di sisi lain, muncul persoalan pendidikan yaitu standarisasi sebagai hasil dari produk global. Spring menjelaskan bahwa dampak globalisasi dalam praktik pendidikan adalah kurikulum, organisasi sekolah dan pedagogi yang diadopsi

(Spring, 2014). Kurikulum pendidikan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan, terhitung sudah berganti sebanyak sembilan kali, menjadikan pendidikan belum menemukan format untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Hidayat, 2011). Kurikulum-kurikulum yang dibuat selama orde baru cenderung mencerabut murid dari akar lingkungannya. Perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum lain justru tidak melahirkan kecerdasan, ketrampilan, perasaan, kreativitas, seni, apresiasi terhadap karya maupun kemanusiaan (Darmaningtyas, 2015). Kurikulum yang terus berganti menunjukkan belum mampu mewujudkan pendidikan sebagai *public goods*, namun justru mendorong ke arah komersialisasi pendidikan.

Kurikulum sebagai produk standarisasi dalam pendidikan berdampak pada praktik pembelajaran di kelas. Sosok guru sekarang ini, menurut Darmaningtyas, lebih tepat disebut sebagai sosok mimikri yang harus pandai menyesuaikan diri sebagai akibat situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mainstream. Guru menjadi tidak otonom lagi. Guru mudah diintervensi oleh berbagai pihak seperti pemodal, tokoh agama, dan tokoh organisasi. Guru tidak punya kuasa untuk mengatakan tidak karena posisi tawarnya amat lemah. Guru tidak mendapatkan peran sebagai pembaharu (Darmaningtyas, 2015). Sementara anak dianggap obyek belajar bukan subyek belajar. Murid sebagai obyek belajar menganggap murid adalah individu yang perlu diajar, tidak bertanggung jawab dan perlu didisiplinkan, belum matang dan perlu dididik, tidak mampu dan perlu dilindungi, menyusahkan dan 'tidak usah didengarkan' (Chambers, R. & Fakih, 2002). Pendapat lain mengatakan bahwa guru yang sudah puluhan tahun berada dalam zona nyaman,

menggunakan model pembelajaran "orde lama" sebagai pusat segala-galanya. Faktor ini menjadikan hambatan guru sebagai teman belajar siswa (Taruna, 2015).

Salah satu aspek implementasi kurikulum di Indonesia adalah penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ditetapkan sebagai proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut adalah Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/16/M.PAN-RB/11/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 butir c yang menjelaskan tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Berlanjut dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dikmenum Dikbud di masa tahun 1999 yang menyatakan bahwa PTK adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Kemudian Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang berkiprah di era 2008 mengarahkan PTK adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Kelebihan PTK meliputi tujuh elemen yaitu praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual terutama materi-materi yang 'penting menurut guru', kerangka kerjanya teratur melalui tahapan tiga siklus, PTK berdasarkan pada observasi nyata dan objektif, PTK bersifat fleksibel dan adaptif, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas, dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan dan profesionalisme guru. Sedangkan kekurangan PTK

adalah: validitasnya masih sering disangsikan, tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sampel sangat terbatas, peran guru *one man show* yaitu bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti sering membuat dirinya menjadi sangat repot (Kusuma, W.; Dwitagama, 2009). Sistem hegemonik ini mengingkari keragaman, menutup diri terhadap pilihan-pilihan dan mengabaikan suara anak. Berbagai alasan tersebut menjadi pendorong perlunya strategi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subyek dan pusat kegiatan pembelajaran serta memerlukan peran aktif pendidik maupun peserta didik secara bersamaan.

Sementara itu, pendidikan mainstream berdampak pula pada organisasi sekolah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui sistem peragaman tipe sekolah. Tipe sekolah yang pernah dan sedang ditawarkan diantaranya adalah tipe bilingual, sekolah internasional, sekolah unggulan, kelas percepatan, dan sekolah favorit. Pemerintah juga pernah merintis pengembangan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan berstandar nasional (RSBN). Namun pada tahun 2012, RSBI dan RSBN dibubarkan karena dianggap telah menyebabkan banyak ketimpangan sosial. Konsep sekolah unggulan membuat makna pendidikan direduksi hanya untuk menyiapkan calon-calon tukang untuk kepentingan industri dan perdagangan. Persoalan pendidikan disederhanakan pada urusan kerja saja, mengabaikan pembangunan identitas diri sebagai individu maupun bangsa, kemerdekaan berpikir, bertindak dan berekspresi terhadap peradaban masa depan (Darmaningtyas, 2015).

Akhirnya praktek pendidikan mainstream hanya berkutat pada persoalan teknis-manajerial. Pendidikan mainstream, mengikuti pendapat Althusser, hanya

menghasilkan lulusan dengan penguasaan *know-how* dan *rules of good behavior* (Althusser, 2001). Pendidikan hanya memudahkan mereka yang mampu menapaki tangga mobilitas sosial-ekonomi dan berhasil menempati stratifikasi sosial. Bagi yang bersangkutan, itulah keberhasilan. Bagi lembaga yang meluluskannya, itulah prestasi dan kebanggan. Namun sesungguhnya yang sedang berlangsung adalah reproduksi dan peneguhan dari sebuah sistem dan bentuk kehidupan bersama yang sarat ketidakadilan. Pendidikan tidak menyentuh dimensi ekonomi-sosial yang lebih luas, karena praktik pembelajaran hanya sekedar sosialisasi dan transfer pengetahuan. Praktik pembelajaran belum mampu membantu menyelesaikan problem personal siswa, kolektif siswa di kelas, sekolah, masyarakat, dan problem sosial. Faktor ini menyebabkan kesadaran siswa tidak terbangun dan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan problem sosial di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut menimbulkan kehilangan besar pada dunia pendidikan untuk melakukan transformasi sosial secara maksimal. Masyarakat tercerabut dari lingkungannya sendiri karena adopsi terhadap konsep pembelajaran yang sepenuhnya berwajah Barat dan orientasi ekonomi yang sepenuhnya bekerja mengikuti mekanisme pasar. Upaya mewujudkan pendidikan yang murah dan tetap bermutu menjadi semakin berat.

James menambahkan bahwa relasi guru dan murid sebagai obyek dianggap melahirkan frustrasi karena menimbulkan dominasi kelas yang menjadi ciri dari pendekatan positivistik (James, 2001). Studi yang pernah dilakukan Spradley menerangkan bahwa kegagalan pendidikan menyebabkan anak tidak memiliki prestasi karena mereka mengalami *culturally deprived* (ketercerabutan budaya)

(Spradley, 2007). Posisi guru sebagai subyek dan murid adalah obyek, melahirkan hegemoni objektivitas karena proses pembelajaran mempersyaratkan adanya standardisasi dan tidak membiasakan siswa memiliki cara berfikir *self criticism*. Tanpa disadari cara ini justru berdampak pada kurangnya siswa memperoleh bekal pengetahuan maupun ketrampilan hidup untuk membangun kemandirian dan kedaulatan.

Penindasan baru telah lahir berkat jasa komersialisasi pendidikan. Daya penindasan ini terjadi luas dan dalam. Bahkan dalam hal yang kelihatannya paling netral dalam pendidikan yakni proses belajar membaca dan menulis, penindasan sudah terjadi. Hubungan mereka yang berkuasa terhadap yang tidak berkuasa membekukan manusia untuk menjadi manusia. Oleh Paulo Freire diungkapkan penindasan adalah tidak manusiawi, apapun alasannya dan merupakan sesuatu yang menafikkan harkat kemanusiaan (dehumanisasi). Dehumanisasi bersifat mendua, dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas penindas. Penindas didehumanisasikan oleh tindak penindasan yang membutakannya bahwa itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Sementara yang tertindas didehumanisasikan oleh realitas eksistensial penindasan dan internalisasi bayang-bayang penindas. Karena itu Freire membuat ‘laboratorium’ untuk mencari model pendidikan yang dapat membebaskan manusia dari penindasan yang tidak disadari. Pendidikan harus membuat anak didik sadar, siapa dirinya dan bagaimana hubungan dirinya dengan dunia luar. Kesadaran ini akan menggugah bahwa dirinya tak sebebaskan seperti yang dibayangkannya. Pendidikan harus mampu menyadarkan bahwa pemaksaan dan penindasan itu tidak hanya mengenai hal fisik, tapi merasuk

ke dalam kesadaran manusia. Disinilah diri manusia disetir oleh kekuasaan para penindas.

Mengkritisi sistem pendidikan bersama Paulo Freire akan membantu untuk menyadari, betapa pendidikan kita banyak menyeleweng dari tugasnya yang paling dasarnya, yakni membantu anak didik menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Freire mengklaim bahwa tugas kemanusiaan kaum tertindas adalah membebaskan dirinya sendiri dari penindas-penindasnya. Bagi mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan, mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam "kebudayaan bisu" (*submerged in the culture of silence*). Dalam budaya bisu, masyarakat khususnya lapisan bawah diam. Mereka dilarang untuk ambil bagian secara kreatif dalam transformasi sosial dan oleh karenanya pada titik yang ekstrem mereka dilarang hidup. Mereka teralienasi dari kekuasaan yang bertanggung jawab atas diamnya mereka (Santoso, 2003). Freire juga berpendapat bahwa pendidikan untuk membebaskan kaum tertindas harus didasarkan atas semangat optimisme, sikap kritis dan resisten. Optimisme berarti merubah pola pikir masyarakat dari kesadaran magis (*magic consciousness*) yang sangat determinis. Sikap ini merupakan langkah awal untuk mengubah sistem yang ada karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki "kehendak" (*will*) dan "kebebasan" (*freedom*) untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itulah, seseorang harusnya optimis dalam menghadapi proses kehidupan ini. Semuanya penuh dengan "keserbamungkinan" (Topatimasang, R., Rahardjo, T., & Fakhri, 2005).

Komersialisasi pendidikan, menurut Freire hanya akan melahirkan “pendidikan gaya bank” (*banking concept of education*). Pendidikan gaya bank merupakan pola hubungan kontradiksi yang saling menekan. Ketika pengajar (guru) ditempatkan pada posisi di atas, maka peserta didik (murid) harus berada di bawah dengan menerima tekanan-tekanan otoritas sang guru. Guru sendiri tidak bersifat independen, dia harus tunduk pada struktur yang menindasnya yaitu pemilik modal. Oleh karena itu pendidikan seperti ini hanya akan melahirkan penindasan dan tidak sesuai dengan fitrah (Freire, 2008a).

Kehadiran Salam sebagai lembaga pendidikan non formal dan mengambil format pendidikan kesetaraan hadir untuk mengisi kesenjangan pendidikan yang beraliran pecinta manusia untuk mengembalikan visi dan misi pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam semangat kerakyatan. Mengapa harus pendidikan non formal? Sebagai warga negara Indonesia, ketika kata pendidikan diungkap, maka hal yang paling mudah untuk memahaminya adalah dengan mengacu pada Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Memahami teks undang-undang tersebut dengan lebih cermat akan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Manakah dari pasal undang-undang tersebut yang memiliki makna yang sama dan mana yang tidak sama? Apa artinya?

Apakah isi undang-undang bisa dikatakan netral atau bahkan bisa dikatakan bebas nilai? Atau isi kedua pasal tersebut sarat dengan muatan ideologis? Menjawab pertanyaan tersebut, maka dengan meminjam dekonstruksi Derrida, memahami realitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih gamblang.

Pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 11 dan 12 UU Sisdiknas 2003, dalam kacamata dekonstruksi, sarat akan muatan ideologi dan bersifat *oposisi biner* yang bersifat hirarkis (Al-Fayyadl, 2005). Proses pendidikan baik formal maupun non formal memiliki peran penting melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada, namun juga sebaliknya memberikan harapan dan peluang terjadinya perubahan yang lebih adil meski jauh dari kata ideal.

Dua ayat UU Sisdiknas tahun 2003 yaitu pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 terdapat kata yang sama yaitu tersrtuktur dan berjenjang dan dilanjutkan dengan penjelasan kata yang mengandung makna tersembunyi yang bersifat antonim yaitu di dalam dan di luar. Apa makna dari kata tersebut? Kata tersrtuktur memberikan pemahaman bahwa sistem pendidikan yang sedang berlangsung haruslah berpedoman pada rambu-rambu yang sudah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Rambu-rambu meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran yang pada akhirnya menuntut para tenaga pendidik melaksanakannya di ruang-ruang kelas mereka.

Makna berjenjang, berarti menuntut adanya sistem yang bersifat hirarkis dari yang rendah ke yang lebih tinggi, atau dari yang bawah sampai yang atas. Pendidikan formal seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut menuntut

setiap peserta didik harus mulai masuk sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Sementara itu, melalui jalur pendidikan non formal, maka peserta didik juga harus menempuh pendidikan secara tersruktur dan berjenjang, seperti mengikuti Paket A, Paket B dan Paket C jika peserta didik ingin mendapatkan pengakuan 'formal' dari negara.

Sementara itu makna tersembunyi yang bersifat antonim yaitu di dalam dan di luar dalam konteks pendidikan formal dan non formal, mengindikasikan adanya aspek tertentu. Aspek yang nampak kasat mata, terkait dengan usia belajar bagi peserta didik yang berbeda dan ketidakmampuan peserta didik di jalur formal mengikuti aturan 'sistem' yang berlaku sehingga harus masuk di jalur pendidikan non formal. Pertanyaan yang sangat mengganggu dan patut dipertanyakan adalah mengapa perbedaan dan ketidakmampuan itu terjadi?

Secara nasional program tersebut dikatakan sukses. Hal ini terbukti dari data SAKERTI tentang *enrolment rate* yang menunjukkan bahwa anak-anak usia Sekolah Dasar yang terhitung dalam angka pendaftaran masuk sekolah setelah masa krisis pada tahun 1998 sedikit lebih tinggi di tahun 2000 daripada tahun 1997 walaupun kenaikannya tidak signifikan. Untuk anak miskin usia 7-12 tahun, ada kenaikan yang signifikan dalam angka *enrolment* dari tahun 1997 sampai tahun 2000 sebanyak 94%. Kemudian diantara anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama angka pendaftaran kira-kira sama di kedua tahun tersebut yaitu sekitar 76-80%. Sedangkan angka *enrolment* untuk Sekolah Menengah Atas tercatat untuk tahun tersebut sebesar 66-75% (Strauss, 2022).

Namun, pendidikan mainstream tidak bisa dipungkiri membawa dampak adanya pihak-pihak yang terluka dan terdiskriminasi (Hamid, 2016). Di Indonesia, banyak pihak yang terekslusi karena pendidikan mainstream seperti kelompok difabel, suku anak dalam, anak jalanan dan yang tinggal di pelosok desa (Afwan, 2020). Pendidikan mainstream melahirkan marginalitas. Marginalitas adalah kondisi yang melibatkan: kelaparan, penyakit, rasa sakit, kekurangan mental, kematian, kejahatan, pergaulan bebas, keputusan, ketidakmungkinan keberadaan (Freire, 1998). Ada persoalan sosial, ekonomi dan kultural yang membingkai pendidikan mainstream sehingga muncul pendidikan alternatif seperti Salam.

Laporan lembaga internasional yang konsen terhadap pendidikan dan sumber daya manusia menjadi kabar yang tidak menyenangkan tentang pendidikan di Indonesia. Indeks pendidikan Indonesia menempati ranking 107 dengan nilai indeks 0,718. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sampai tahun 2019 akses untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi menunjukkan angka 13,6. Kondisi ini masih dibawah negara tetangga, Malaysia, Singapura dan Thailand yang menempati rangking 62, 11 dan 79 (UNDP, 2021). Laporan ini bermakna bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan jauh dari jangkauan sebagian besar masyarakat, terutama bagi komunitas dan daerah yang terpinggir dan terpinggirkan. Negara sebagai agen utama pendidikan belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, khususnya pendidikan formal, bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah hampir tiga ratus juta dan memiliki keragaman

baik suku, bahasa, agama maupun perbedaan sosial-ekonomi dan faktor 'lainnya'. Kritik pedas yang dilontarkan kaum Neo-Marxism mengungkapkan bahwa pendidikan formal pada dasarnya hanya menyumbangkan sedikit terhadap pengalaman manusia yang begitu luas, dan memandang sekolah adalah ruang kedap suara dan mengunci kesadaran (Subkhan, 2016).

Mengikuti anjuran Deklarasi Dunia 1990 tentang pendidikan untuk semua serta menghadapi arus globalisasi pendidikan, maka negara harus menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan aktor lain dan bersama-sama memainkan peran dalam pendidikan. Mereka adalah kelompok masyarakat sipil sebagai domain ketiga yang terpisah dari pasar dan negara. Kelompok masyarakat ini lebih dekat ke tingkat akar rumput dan memikul tanggung jawab untuk program pendidikan non-formal. Peran organisasi sipil dalam memberikan pendidikan sangat penting ketika sebagian masyarakat meragukan pendidikan yang bersifat mainstream. Mereka mampu menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan efektif di berbagai bidang seperti partisipasi masyarakat, pemberdayaan, literasi, sekolah komunitas, kesehatan reproduksi dan pendidikan anak usia dini. Mereka menyediakan sumber pemikiran baru, bertindak sebagai pengkritik kebijakan resmi dan mengadvokasi pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa (Swain, 2018).

Salam adalah salah satu elemen pendidikan alternatif mewakili masyarakat sipil. Lembaga ini menyokong pendidikan dasar dengan memilih Perkumpulan Sanggar Anak Alam sebagai badan hukum dan terdaftar sebagai institusi pendidikan nonformal dengan label PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

pada tahun 2010 (Gernatititi; Rejeki, K.; Wahyaningsih, 2019). Fakta ini senada dengan kajian yang dilakukan oleh Archer tentang peran dan praktek pendidikan yang dilakukan oleh LSM di empat negara yaitu El Salvador, India, Bangladesh dan Uganda. Archer menunjukkan pentingnya LSM dan negara terlibat dalam pelayanan di sektor pendidikan baik pada tingkat perencanaan maupun koordinasi menghadapi situasi kontradiktif. Situasi dimana masyarakat yang didampungnya, sedang memiliki masalah dengan pihak pemerintahan dan membutuhkan upaya advokasi untuk 'melawan pemerintah' (Archer, 1994).

Sri Wahyaningsih, sebagai pengagas Salam, memiliki perjalanan panjang melawan struktur pendidikan yang menindas. Menjelang usianya yang memasuki 60 tahun, dengan tekun ia membentuk komuni dengan rakyat sejak di Lawen, Banjarnegara, pada tahun 1988 dan kemudian pindah ke Yogyakarta. Perjalanan ini bercirikan berangkat dari pengaduan atas kondisi tidak adil dan kemudian mendorong lahirnya sebuah proyek untuk memecahkan masalah. Sekolah alternatif ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang tidak menjejalkan pengetahuan pada anak-anak. Salam menempatkan murid sebagai subyek yang berperan dalam perubahan. Pengetahuan anak dibangun dari obrolan ringan untuk memantik rasa ingin tahu pada saat peristiwa belajar berlangsung (Gernatititi; Rejeki, K.; Wahyaningsih, 2019). Salam merangkul orangtua untuk aktif dalam proses belajar dengan tujuan mendorong mereka terus belajar dan mampu mendampingi anak belajar. Lembaga pendidikan ini mengembangkan konsep sekolah keluarga sebagai bentuk keterlibatan orangtua pada proses pembelajaran dan menjadi modal sosial dalam pengembangan (Mardliyah et al., 2020).

Salam menggunakan sumber daya, keterampilan, dan hak istimewa untuk membuat aksesibilitas anak bersekolah. Sekolah ini menciptakan proses belajar agar anak mengalami, memahami, dan merancang sebab akibat sebuah fenomena melalui metode riset sehingga mendorong anak memahami bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Salam mewakili salah satu institusi pendidikan non formal yang bersifat independen dan menyajikan gambar dunia (*word-picture*) yang mendasar melalui riset sebagai metode belajar. Meski konsep ini bersifat represif, namun dapat diterima oleh seluruh unsur sekolah karena mereka sendiri yang melegitimasi dan mengabsahkannya berdasarkan keyakinan dalam gambaran dunianya (Supraja, 2018). Seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Coombs dengan istilah *new pair of glasses* untuk mendeskripsikan bahwa antara pendidikan non formal dan formal adalah sejajar untuk melihat totalitas upaya pendidikan yang teorganisir di suatu negara, maka Salam membuktikan diri layak mendapat tempat yang ‘setara’ dengan sekolah formal yang mainstream (Coombs, P., Manzoor, A., & Israel, 2016).

Tuntutan dekonstruksi untuk menjawab persoalan pendidikan adalah bahwa pendidikan wajib murah. Pendidikan mutlak dapat dijangkau oleh mereka yang miskin. Sekolah hendaknya menjadi ladang penyemaian bagi mekarnya gerakan sosial; suatu gerakan yang didorong oleh motivasi keberpihakan serta dukungan yang besar terhadap kesejahteraan guru. Di mana-mana sekolah menjadi tempat untuk mengasah kemampuan berpikir dan berpolitik. Seperti halnya miniatur sosial, sekolah menjadi tempat berinteraksi berbagai kelas sosial di masyarakat. Pada sisi

itulah sebenarnya sekolah mengemban fungsi penting, yakni melatih kemampuan dan ketrampilan sosial siswa.

Untuk mendorong proses belajar menjadi peka terhadap persoalan ketidakadilan sosial era globalisasi ini, penyelenggaraan proses belajar perlu secara otonom menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, bagaimana mereka memperjelas keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana mereka menerjemahkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan proses belajar. Oleh karena itu membangun ideologi pendidikan sekaligus mempersiapkan metode dan tekniknya menjadi salah satu kegiatan yang strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Kondisi ini menghadirkan pendidikan kritis yang berpegang pada paradigma kritis. Paulo Freire sebagai seorang ideolog pendidikan kritis, mengungkapkan bahwa hakekat ‘pembebasan’ adalah suatu proses bangkitnya “kesadaran kritis” rakyat terhadap sistem dan struktur sosial yang menindas. Pembebasan bagi mereka tidak saja terbebas dari kesulitan aspek material saja, tapi juga adanya ruang kebebasan dari aspek spiritual, ideologi maupun kultural. Dijelaskannya bahwa sesungguhnya rakyat memerlukan tidak saja bebas dari kelaparan, tetapi juga “bebas” untuk mencipta dan mengkonstruksi dan untuk bercita-cita (Freire, 2008a). Dalam waktu yang hampir bersamaan Ivan Illich (1926-2002) menawarkan pemikirannya yang memaksa kita untuk menguji kembali beberapa asumsi pendidikan yang diterima selama ini. Bukunya yang dianggap subversif, *Deschooling Society*, menggerakkan pentingnya revolusi budaya guna menciptakan pendidikan lebih bermartabat (Illich, 1984).

Bagi penganut pendidikan kritis ketidakadilan kelas, diskriminasi gender, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya seperti hegemoni kultural dan politik serta dominasi melalui diskursus pengetahuan yang merasuk di dalam masyarakat, akan terefleksi dalam proses pendidikan, dan harus menjadi cermin kondisi sosial dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif kritis, proses pendidikan merupakan proses refleksi dan aksi (praxis) terhadap seluruh tatanan dan relasi sosial dari sistem dan struktur sosial dan bagaimana perannya, cara kerjanya dalam menyumbangkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Karena tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur yang diskriminatif terhadap kaum tertindas dan kaum yang tersingkirkan seperti kaum miskin, kaum buruh, para penyandang cacat atau mereka yang memiliki kemampuan berbeda, kaum perempuan, anak-anak serta bagaimana melakukan proses dekonstruksi dan berbagai aksi praktis maupun strategis menuju sistem sosial yang sensitif dan non diskriminatif.

Melihat kecenderungan sistem pendidikan tersebut, tulisan ini menawarkan pemikiran Freire tentang pendidikan yang bercirikan dialogis dan bukan antialogis, yang kemudian dikenal dengan *problem posing education* sebagai antitesanya (Topatimasang, R., Rahardjo, T., & Fakih, 2005). *Problem posing education* yang diterjemahkan dengan pendidikan hadap masalah adalah pendidikan dialogis sebagai upaya untuk meletakkan pendidikan pada kerangka dasar yang melibatkan anak didik dalam problematisasi yang dihadapi terus menerus akan situasi eksistensial mereka (Yunus, 2005). Salam memiliki, meski tidak seluruhnya, argumentasi Freire sebagai contoh lembaga pendidikan yang

radikal dan diperlukan dalam proses edukatif yang menampilkan konsep *problem posing education*. Praktik konsep ini di Salam berbeda dengan beberapa kajian tentang penerapan pendidikan hadap masalah ala Freire yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan lain yang dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut ini.

Penelitian Ayudha pada Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga menjelaskan bahwa pendidikan hadap masalah menekankan bahwa pusat dari pembelajaran adalah siswa bukan guru. Dengan demikian maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan didasarkan pada permasalahan yang terjadi sehari-hari. Guru dan murid menjadi subyek-subyek yang sama-sama belajar (Ayudha, 2016). Namun penelitian ini belum menjelaskan faktor-faktor yang mendorong munculnya proses pembelajaran. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Luna yang melihat implementasi pendidikan hadap masalah di sekolah formal berbasis agama, menjelaskan perlunya tiga hal yaitu pertama, guru tidak lagi menjadi orang yang mengajar melainkan orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para murid. Kedua, sistem pendidikan hadap masalah membangkitkan kesadaran dan keterlibatan kritis dalam realitas. Ketiga, pentingnya lingkungan sosial yang tidak dapat dilepaskan dalam proses pembelajaran (Luna et al., 2018). Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan aktor penting yang mendesain sistem pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional, kurikulum nasional dan kurikulum khas sekolah

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Suparwoto, menempatkan model *problem posing* sebagai metode dalam pembelajaran pada

pokok bahasan mata pelajaran tertentu dengan menggunakan desain PTK (Abdurrahman; Suparwoto, 2007). Implementasi model hadap masalah yang diadopsi dari pemikiran Freire, dalam penelitian ini hanya terbatas dilaksanakan dalam tiga kali siklus pembelajaran dan hanya pada mata pelajaran yang 'sengaja dipilih oleh guru'. Sifatnya adalah eksperimen dan terbatas pada satu kelas saja. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Candiasa yang mengemas problem posing dalam *frame puzzle* agar dapat meningkatkan minat dan kemampuan siswa belajar (Candiasa et al., 2018). Pemikiran tentang pendidikan hadap masalah yang hanya digunakan sebagai tehnik dalam pembelajaran juga dikemukakan oleh Hiba untuk mengarahkan siswa memperoleh kesadaran kritis melalui pengajaran tentang teori argumentasi (Hiba, 2020). Ada penelitian yang dilakukan oleh Ferrari, menggunakan pendidikan hadap masalah dari Paulo Freire untuk mengelaborasi dan menerapkan dalam mode pendidikan jarak jauh untuk pelatihan guru jarak jauh. Salah satu tujuan dari kursus singkat ini adalah untuk memperkenalkan kosakata ilmiah dan guru diminta menemukan beberapa istilah ini dalam artikel ilmiah, buku, majalah, laporan TV atau dalam percakapan dengan teman (Ferrari et al., 2009).

Semua hasil-hasil penelitian di atas yang mengimplementasikan pemikiran pendidikan hadap masalah Paulo Freire, hanya sebatas sebagai metode atau tehnik dalam proses pembelajaran di kelas saja. Pemikiran Freire belum dipahami sebagai ideologi untuk melakukan aksi pendidikan dalam tataran yang lebih luas, dimana Freire menegaskan bahwa pendidikan hadap masalah adalah upaya untuk memberdayakan siswa dan masyarakat. Pemikiran Freire tentang pendidikan yang

membebaskan, belum ada yang membahas konsep aksi budaya dan konsientisasi sebagai unsur penting berhasilnya pendidikan hadap masalah. Dua konsep ini kurang mendapat perhatian ketika mengkaji pendidikan sebagai aktifitas pendidikan yang melahirkan kesadaran sehingga mampu menjadi sarana pemberdayaan, pengayaan dan tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi seperti kerjasama dan persaudaraan. Eksistensi Salam sebagai lembaga pendidikan alternatif adalah pembuka dimensi baru yang mengangkat konsep aksi budaya dan konsientisasi berkompetisi dengan pendidikan mainstream. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lebih jauh bahwa Salam memegang praktik aksi budaya yang melahirkan konsientisasi untuk menghadirkan pendidikan yang humanis.

Pandangan Freire tentang aksi budaya berangkat dari persoalan atas ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang melahirkan kepemimpinan yang revolusioner. Konsep aksi budaya mendikotomikan posisi yang saling berseberangan yang wujudnya adalah perilaku yang bersifat antagonistik (Freire, 2007b). Sementara itu *conscientizacao* (konsientisasi) merupakan konsep penting Freire, yang tidak terbatas sekedar pemberantasan huruf orang dewasa di Brazil. Sejak awal Freire memanfaatkan pemberantasan buta huruf sebagai alat untuk membantu masyarakat agar bisa memahami bagaimana sistem kehidupan mengorbankan dan menindas mereka, mengambil tindakan bersama dan demokratis untuk mengubah sistem. Proses membaca dan menulis adalah proses politik yang bersama-sama menamakan, memahami, dan secara demokratis mengubah masyarakat.

Aksi budaya dan konsientisasi menjadi tolok ukur untuk melihat apakah suatu sistem pendidikan itu demokratis atau otoriter, memberdayakan siswa atau membelenggu siswa. Kekosongan pengetahuan inilah, yang memberi alasan pada kajian penelitian ini untuk menjelaskan suatu pola pendidikan sebagai proses pengembangan cara hidup manusia yang lebih manusiawi. Alasan ini pula yang mengantarkan pada argumentasi bahwa institusi pendidikan masih menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Salam menciptakan ekosistem belajar dibandingkan pernak-pernik dalam menyelenggarakan proses belajar. Kondisi ini membutuhkan aksi perjuangan untuk melahirkan kesadaran pentingnya pendidikan yang memihak. Dengan alasan tersebut, penelitian ini berpijak pada pilihan pemikiran pendidikan Freire tentang aksi budaya yang dapat melahirkan konsientisasi sebagai upaya dekonstruksi melalui pendidikan. Sehingga fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses aksi budaya berlangsung dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam? Aksi budaya seperti apakah yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam?
2. Bagaimana aksi budaya dapat mengembangkan konsientisasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang proses aksi budaya dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam.
2. Memberikan pemahaman tentang bentuk aksi budaya dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam.
3. Memberikan pemahaman bahwa aksi budaya dapat mengembangkan konsientisasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Salam.